



PENGANTAR REDAKSI

Demokrasi dan demokratisasi di Indonesia mengalami “kemandekan”, semangat demokrasi dan demokratisasi terhenti dalam bentuk prosedur yang bermakna instrumental, dan meninggalkan arti substansialnya. Bappenas, melansir bahwa indeks demokrasi Indonesia berada pada nilai 67,30 tahun 2009. Pemerintah bahkan menargetkan indeks itu naik menjadi 75 pada akhir 2014. Adapun instrumen yang digunakan adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi. Kondisi tersebut menghasilkan benturan keras dalam konsep maupun praktiknya, sehingga demokrasi dan demokratisasi sampai saat ini menyisakan banyak persoalan. Pada aras konsep, persoalan muncul ketika demokrasi dan demokratisasi diterjemahkan dalam wujud kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik. Sedangkan dalam aras praktik, muncul isu ketidaksiapan dalam merespon peluang dan tantangannya.

Jurnal Pemikiran Sosiologi (JPS) volume 1 No.1 Mei 2012, merupakan edisi perdana yang diharapkan dapat menjadi simpul dari berbagai perspektif dalam melihat, merasakan dan meraba dinamika demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Dalam penyajiannya para penulis mengangkat perjalanan konsep sampai dengan praktik demokrasi di Indonesia. Pertama, Heru Nugroho, membuka dengan menjelaskan debat antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Heru juga menjelaskan praktek demokrasi setelah era reformasi 1998 dan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh negara dalam menciptakan masyarakat demokratis. Kedua, S. Bayu Wahyono, menyoroti budaya politik kalangan akar rumput yang bertingkah laku politik bersih perlu ditiru oleh kalangan elite politik. Hal tersebut akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ketiga, Oki Rahadianto Sutopo, mempersoalkan nilai-nilai etik terutama biaya-biaya manusia dalam hal fisik maupun makna yang tidak menjadi prioritas utama dalam era neoliberal sekarang. Pengurangan subsidi, deregulasi dan privatisasi menjadi tiga kata ajaib untuk menciptakan pasar bebas. Keempat, Derajad S. Widhyarto memotret perlindungan kesehatan perempuan yang berpacu dengan kompetisi, partisipasi dan kebebasan. Kota Madiun menjadi arena kontestasi tersebut, resikonya demokrasi termodifikasi oleh dinamika sosial, politik dan pasar. Kelima, Mahendra Wijaya, mengusulkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan prioritas kepada usaha bisnis kecil sebagaimana telah tertulis dalam undang-undang dasar terkait dengan demokrasi ekonomi. Keenam, Mahesa Mandiraatmadja, Heru Nugroho dan Irwan Abdullah, menyatakan telah muncul gerakan anti penuaan yang mendorong kesehatan tidak harus dipecahkan dengan sebuah pendekatan medis, melainkan perlu dilihat dari berbagai perspektif. Ketujuh, Ratna Noviani, menyatakan tayangan reality show menunjukkan proses reifikasi dan obyektifikasi realitas kemiskinan guna mendefinisikan dan menggarisbawahi ibadah kelas. Kedelapan, Nurul Aini, menyatakan pemekaran wilayah di Maluku Utara memiliki dampak pada terjadinya proses rutinisasi kekerasan, khususnya kekerasan yang berbasis pada etnik atau identitas tertentu.

Redaksi